

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Proses perumusan kebijakan Bina Lingkungan telah melalui tahap-tahap yang telah sesuai dengan proses formulasi sebuah kebijakan untuk menjawab masalah pendidikan yang ada di Kota Bandar Lampung.

1. Kebijakan bina lingkungan dirumuskan berdasarkan dengan masalah-masalah dibidang pendidikan yang muncul ,seperti masalah anak putus sekolah karna keterbatasan biaya di Kota Bandar Lampung. Kemampuan pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menggali kebutuhan pendidikan dikota ini sudah sangat baik dengan mengandalkan kordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk menggali kebutuhan masyarakat.
2. Penyusunan agenda kebijakan bina lingkungan dilakukan oleh para stakeholders (DPRD, Kepala Daerah, Dinas yang terkait). Penyusunan agenda kebijakan berdasarkan pada masalah yang benar terjadi dimasyarakat namun tidak dipungkiri masalah publik itu pun didasarkan atas kepentingan politik.

3. Pemilihan alternatif disini tidak ada karna pada tahapan ini kebijakan bina lingkungan langsung dipilih sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah pendidikan di Kota Bandar Lampung. Dikarnakan juga keputusan ini merupakan keputusan yang mengcover kepentingan kaum elite.
4. Bina Lingkungan merupakan salah satu program unggulan yang telah disiapkan oleh bapak Herman HN sebagai alternatif kebijakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan yang kemudian ditetapkan sebagai Produk Hukum Daerah yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraa Pendidikan serta Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka saran yang dapat peneliti ambil adalah :

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung seharusnya dapat melakukan pembenahan dalam pelaksanan proses perumusan kebijakan agar program Kebijakan Bina Lingkungan ini dapat berjalan adil dan transparan sehingga tidak dijadikan sebagai kepentingan politik demi tercapainya tujuan dari para kaum elite.
2. Dalam perumusan kebijakan sebaiknya para aktor yang terlibat juga melibatkan akademisi yang membidangi kebijakan publik, misalnya seperti Dosen pengajar kebijakan publik.

3. Sebaiknya masyarakat harus aktif dan ikut serta untuk mengawasi pelaksanaan program kebijakan bina lingkungan, agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan awal dari kebijakan ini diformulasikan.